

Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kutai Timur

Muhammad Rizal Farsanjani, Yunita Fitria*

Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Mulawarman, Samarinda
Jl. Kuaro, Gn Kelua, Samarinda, Indonesia

*Korespondensi: nestanzirualuo98@gmail.com

Article history:

Received: 22/01/2026
Revised: 03/02/2026
Accepted: 03/08/2026
Published: 06/08/2026

Keywords:

Accountability,
Participation, Budgetary
Discipline, Transparency

Abstract

Taxes are a major source of state revenue and a vital role in financing national development and enhancing public welfare. Tax revenues enable government to fund infrastructure projects, deliver public services, and support strategic national programs, making the achievement of revenue targets essential for sustainable development. One of the most significant components of income tax in Indonesia is Income tax (PPH) 21, which is levied on individual taxpayers' earnings such as salaries, honoraria, and other forms of remuneration. However, compliance among individual taxpayers remains a persistent challenge. This study aims to examine the effects of taxpayer awareness, tax knowledge, and tax sanctions on individual taxpayer compliance. A quantitative approach, primary data were collected through a Likert scale questionnaire. The sample consisted of 400 individual taxpayers holding a Taxpayer Identification Number (NPWP) in the Kutai Timur region. Data were collected via an online survey using Google forms and analyzed using the Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4.0 software. The result of this study indicate that taxpayer awareness, tax knowledge, and tax sanctions have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. This study contributes to the taxation literature by providing empirical evidence from a regional context.

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak memungkinkan pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur, menyediakan layanan publik, dan mendukung program-program strategis nasional, sehingga pencapaian target penerimaan pajak menjadi hal yang esensial bagi pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu komponen paling signifikan dari pajak penghasilan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi seperti gaji, honorarium, dan bentuk remunerasi lainnya. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih menjadi tantangan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner berskala Likert. Sampel penelitian terdiri dari 400 wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di wilayah Kutai Timur. Data dikumpulkan melalui survei daring menggunakan Google Forms dan dianalisis dengan metode *Partial Least Square-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur perpajakan dengan menyajikan bukti empiris dan konteks wilayah regional.

Kata Kunci:

Akuntabilitas,
Partisipasi, Tertib
Anggaran, Transparansi

PENDAHULUAN

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan otonomi desa di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui undang-undang ini, pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangan desa secara mandiri yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes), serta bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah. Dana desa digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Pada tahun 2024, pemerintah pusat mengalokasikan Rp. 71 triliun untuk dana desa secara nasional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Program ini diharapkan dapat mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, khususnya tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan Tujuan 16 (Institusi yang Tangguh, Akuntabel, dan Inklusif). Namun, meskipun telah berjalan hampir satu periode, pengelolaan keuangan desa di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala.

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan BPK (2020) menunjukkan bahwa sekitar 23% desa di Indonesia mengalami temuan audit, terutama dalam hal keterlambatan pelaporan keuangan, ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran, serta kelemahan sistem pencatatan manual. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa, minimnya literasi digital, serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola keuangan desa. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meluncurkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada tahun 2015. Aplikasi tersebut merupakan sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk mendukung seluruh siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan (penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/RAPBDes), pelaksanaan dan pencatatan transaksi keuangan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban (LKPD). Aplikasi ini sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Dengan fitur seperti input data secara otomatisasi laporan keuangan, dan jejak audit digital (audit trail), Siskeudes terbukti mampu mengurangi kesalahan pencatatan hingga 50% dan mempercepat proses pelaporan keuangan dari hitungan minggu menjadi hari (BPKP, 2021). Hingga akhir tahun 2024, Siskeudes telah diterapkan di lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia, dengan tingkat adopsi mencapai sekitar 68% Badan Pusat Statistik, (2024). Namun demikian, keberhasilan implementasi Siskeudes sangat bergantung pada tingkat penerimaan dan kemampuan pengguna, terutama aparatur desa yang sebagian besar masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi ini agar pemanfaatannya dapat optimal. Salah satu pendekatan teoritis yang relevan untuk menganalisis penerimaan Siskeudes adalah Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Model ini menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua konstruk utama, yaitu *perceived usefulness* (kemanfaatan yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan yang dirasakan). Semakin tinggi persepsi pengguna terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan suatu sistem, maka semakin besar pula niat mereka untuk menggunakan sistem tersebut secara berkelanjutan.

Sejumlah penelitian sebelumnya mendukung relevansi Technology Acceptance Model (TAM) dalam menjelaskan penerimaan dan penggunaan Siskeudes oleh aparat desa. Penelitian oleh Adhivinna & Damayanti, (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, meskipun pemanfaatan Siskeudes belum selalu berdampak langsung pada akuntabilitas tanpa didukung kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat. Peneliti yang menekankan peran *perceived usefulness* dilaporkan oleh penelitian Pratiwi & Pravasanti, (2020) yang menemukan bahwa persepsi manfaat dan niat penggunaan secara signifikan mempengaruhi pemanfaatan Siskeudes dalam praktik pengelolaan keuangan desa. Melalui pendekatan Technology Acceptance Model (TAM), implementasi Siskeudes di Kecamatan Luahagundre Maniamolo dapat dianalisis dari dua dimensi utama, yaitu *perceived usefulness* (kemanfaatan yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan yang dirasakan). Dimensi kemanfaatan menekankan sejauh mana aparatur desa meyakini bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, seperti mempercepat penyusunan laporan keuangan, mengurangi kesalahan perhitungan, serta meningkatkan

Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kutai Timur

Muhammad Rizal Farsanjani, Yunita Fitria

keakuratan dan transparansi data keuangan. Sementara itu, dimensi kemudahan penggunaan menggambarkan persepsi aparat desa mengenai sejauh mana aplikasi tersebut mudah dipelajari, dipahami, dan dioperasikan tanpa memerlukan kemampuan teknis yang kompleks. Dalam konteks Kecamatan Luahagundre Maniamolo, kedua faktor ini sangat menentukan tingkat penerimaan dan keberhasilan implementasi Siskeudes. Aparatur desa yang merasakan kemanfaatan nyata dari sistem ini akan lebih termotivasi untuk menggunakannya secara konsisten, meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas teknologi. Sebaliknya, jika aplikasi dirasakan sulit digunakan atau tidak memberikan nilai tambah yang signifikan, maka potensi resistensi terhadap penggunaan sistem akan meningkat. Oleh karena itu, penerapan teori TAM dalam penelitian ini menjadi relevan untuk mengidentifikasi sejauh mana persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa di wilayah dengan karakteristik geografis dan sumber daya seperti Kecamatan Luahagundre Maniamolo.

Lebih jauh lagi, hasil analisis dengan pendekatan TAM diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan serta penguatan infrastruktur digital di wilayah kepulauan. Dengan demikian, implementasi Siskeudes tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen transformasi digital desa, yang mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan berorientasi pada akuntabilitas publik. Penerapan teknologi informasi yang diterima dengan baik oleh pengguna diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pemerintahan desa digital yang mendukung visi pembangunan daerah serta sejalan dengan tujuan SDGs Desa, terutama dalam hal peningkatan kinerja ekonomi dan tata kelola yang inklusif. Kecamatan Luahagundre Maniamolo terbagi atas 10 desa yang ditinjau dari website Indeks Desa Membangun (IDM) (Databasedatin, 2023) Pemerintah pusat mengalokasikan dana yang cukup besar yang di berikan kepada desa untuk mewujudkan program dan kegiatan pembangunan desa sehingga dapat memberikan ketentraman dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Berikut tabel dana desa di Kecamatan Luahagundre Manimolo beserta status desa di Kecamatan Luahagundre Maniamolo dari tahun 2021-2024

Tabel 1
Desa di Kecamatan Luahagundre Maniamolo

No	Nama Desa	Status Desa
1	Bawomaenamolo	Maju
2	Lagundri	Maju
3	Botohili Sorake	Berkembang
4	Sondregeasi	Berkembang
5	Botohili Tano	Berkembang
6	Hilimaenamolo	berkembang
7	Hilimaetaniha	Berkembang
8	Botohili Silambo	Berkembang
9	Botohili Salo'o	Berkembang
10	Orahili Faomasi	Tertinggal

Sumber : (Indeks Desa Membangun 2025)

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah diharapkan bisa membangun setiap desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, berdasarkan Indeks Desa Membangun, di Kecamatan Luahagundre Maniamolo masih ada satu desa yang tertinggal sehingga memberikan dampak yang kurang baik bagi warga setempat. Besarnya dana desa yang diterima oleh setiap desa berbeda-beda, sesuai dengan PMK Nomor 49/PMK.07.2016. Dalam aturan tersebut, dana desa dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula. Alokasi ini ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, serta luas wilayah desa, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. Penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan Siskeudes, kajian yang menganalisis pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan perspektif Technology Acceptance Model (TAM), khususnya pada wilayah dengan karakteristik geografis dan tingkat perkembangan desa yang beragam seperti Kecamatan Luahagundre Maniamolo, masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi dasar penting untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan Siskeudes dapat mendukung efektivitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul "Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes dalam Perspektif Technology Acceptance Model (TAM) pada Desa di Kecamatan Luahagundre Maniamolo".

KAJIAN LITERATUR/PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Perceived Ease of Use adalah keyakinan bahwa suatu sistem mudah dipahami dan digunakan tanpa memerlukan usaha yang besar. Dalam penggunaan Siskeudes, kemudahan ini terlihat dari seberapa mudah aparaturnya mempelajari fitur, melakukan pencatatan, menyusun laporan, dan mengelola data keuangan desa. Jika sistem mudah digunakan, maka aparaturnya akan lebih cepat beradaptasi, bekerja lebih efisien, dan meminimalkan kesalahan dalam pencatatan maupun pelaporan. Hal ini akan meningkatkan ketepatan waktu, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian dirumuskan hipotesis:

H₁: *Perceived Usefulness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Perceived Ease of Use merupakan persepsi aparaturnya mengenai tingkat kemudahan dalam menggunakan aplikasi Siskeudes untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan desa. Dalam kerangka Technology Acceptance Model (TAM), kemudahan penggunaan suatu sistem akan memengaruhi tingkat penerimaan dan intensitas penggunaannya. Semakin mudah suatu sistem dipahami dan dioperasikan, maka semakin tinggi kecenderungan pengguna untuk memanfaatkannya secara optimal. Dalam pengelolaan keuangan desa, kemudahan penggunaan Siskeudes membantu aparaturnya dalam proses penginputan data, pencatatan transaksi, penyusunan laporan, serta penatausahaan keuangan secara lebih efektif dan efisien. Kemudahan tersebut dapat meminimalkan kesalahan administratif, mempercepat proses kerja, dan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dengan demikian dirumuskan hipotesis:

H₂: *Perceived Ease of Use* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam Technology Acceptance Model (TAM), *Perceived Usefulness* dan *Perceived Ease of Use* merupakan dua faktor utama yang memengaruhi penggunaan suatu sistem. *Perceived Usefulness* berkaitan dengan manfaat sistem dalam meningkatkan kinerja, sedangkan *Perceived Ease of Use* berkaitan dengan kemudahan dalam mengoperasikan sistem. Jika aparaturnya merasa bahwa Siskeudes bermanfaat dan mudah digunakan secara bersamaan, maka penggunaan sistem akan lebih optimal. Hal ini akan meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan pencatatan, serta memperbaiki kualitas pelaporan keuangan desa. Dengan demikian dirumuskan hipotesis:

H₃: *Perceived Usefulness* dan *Perceived Ease of Use* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018), metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada pengukuran variabel dan analisis data secara statistik, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian serta analisis data bersifat kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada aparaturnya yang menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 40 orang yang berasal dari desa-desa di Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan.

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden yang telah ditentukan sebagai sampel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Perceived Usefulness* (X1) dan *Perceived Ease of Use* (X2), sedangkan variabel dependen adalah Pengelolaan Keuangan Desa berbasis Siskeudes (Y).

Teknik analisis data menggunakan uji regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 25. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Keterangan :

Y = Pengelolaan Keuangan Desa
 X1 = *Perceived Usefulness*
 X2 = *Perceived Ease of Use*
 α = Bilangan Konstanta
 β = Bilangan Koefisien
 e = Error yang ditolerir

HASIL

Uji Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan menggunakan uji statistik t untuk mengetahui pengaruh variabel persepsi kemanfaatan yang dirasakan (Perceived Usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan yang dirasakan (Perceived Ease of Use) terhadap pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes. Dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Hasil uji statistik t dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parsial)

	B	Std. Error	Beta	t	Sig
(Constant)	19.975	3.275		6.099	.000
Persepsi Kemanfaatan yang dirasakan (PU)	-.084	.149	.026	.565	.576
Persepsi kemudahan penggunaan yang dirasakan (PEU)	.016	.145	.019	.112	.911

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan desa berbasis Aplikasi Siskeudes (Y)

Berdasarkan hasil uji statistik t yang disajikan pada Tabel 2, diketahui bahwa variabel Perceived Usefulness (PU) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,084 dengan nilai signifikansi sebesar 0,576 ($>0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Perceived Usefulness (PU) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi aparatur desa mengenai kemanfaatan aplikasi Siskeudes belum mampu memberikan pengaruh yang berarti terhadap peningkatan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, variabel Perceived Ease of Use (PEU) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,016 dengan nilai signifikansi sebesar 0,911 ($>0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Perceived Ease of Use (PEU) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes. Dengan demikian, persepsi kemudahan penggunaan aplikasi Siskeudes yang dirasakan oleh aparatur desa belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Uji Statistik F (Uji Signifikan Simultan)

Uji ini dilakukan untuk menganalisis apakah semua variabel bebas/independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel terikat/dependen. Cara untuk uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai $df_1 = k-1$ dan $df_2 = n-2$ yang mana k adalah jumlah seluruh variabel dependen dan independent serta n adalah jumlah sample.

Tabel 3
Hasil Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	31.700	1	31.700	4373.978	.000 ^b
	Residual	.275	38	.007		
	Total	31.975	39			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan desa berbasis Aplikasi Siskeudes (Y)

b. Predictors: (Constant), Unstandardized Residual

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} 4373.978 dengan tingkat signifikan 0,000. Sedangkan nilai F_{tabel} pada alpha 5% adalah 4.10 Oleh karena itu $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($4373.978 > 4.10$) dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa *Perceived Usefulness* (X1) dan *Perceived Ease of Use* (X2), sedangkan variabel dependen adalah Pengelolaan Keuangan Desa berbasis Siskeudes (Y). secara bersama-sama dan signifikan berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi ($\text{Adjusted } R^2$) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel independen, yaitu *Perceived Usefulness* (PU) dan *Perceived Ease of Use* (PEU), dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen yaitu pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes. Nilai koefisien determinasi menunjukkan besarnya kontribusi kedua variabel tersebut dalam menjelaskan model penelitian. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi ($\text{Adjusted } R^2$)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.093 ^a	.009	.045	.92561	2.028

a. Predictors: (Constant), Persepsi kemudahan penggunaan yang dirasakan (PEU) (X2), Persepsi Kemanfaatan yang dirasakan (PU) (X1)

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan desa berbasis Aplikasi Siskeudes (Y)

Berdasarkan tabel 4 besarnya nilai Adjusted R Square adalah 0.45 yang berarti sebesar 0.45 (4,5%) variabel independen yaitu Persepsi kemanfaatan yang dirasakan (*Perceived usefulness*), Persepsi kemudahan penggunaan yang dirasakan (*Perceived Ease of Use*) dan peran perangkat kerja mampu menjelaskan atau menggambarkan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan sisanya sebesar 38,8% dijelaskan atau digambarkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Perceived Usefulness* terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) menunjukkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti *Perceived Usefulness* (persepsi kemanfaatan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Luahagundre Maniamolo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi perangkat desa terhadap manfaat sistem pengelolaan keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa akan semakin baik. Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan teori Agency Theory Technology Acceptance Model (TAM) bahwa persepsi kemanfaatan merupakan keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu sistem dapat meningkatkan kinerjanya. Dalam pengelolaan keuangan desa, sistem yang dirasakan bermanfaat akan membantu perangkat desa dalam menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, tepat, dan teratur, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Perceived usefulness pada desa-desa di Kecamatan Luahagundre Maniamolo diamati melalui hasil kuesioner yang terdiri dari beberapa indikator, seperti kemudahan dalam pencatatan keuangan, peningkatan efektivitas kerja, serta kemudahan penyusunan laporan keuangan desa. Berdasarkan hasil penilaian responden, secara umum persepsi kemanfaatan berada pada kategori baik, yang menunjukkan bahwa perangkat desa merasakan manfaat dari sistem pengelolaan keuangan desa yang digunakan. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Luahagundre Maniamolo telah dilakukan dengan memanfaatkan sistem pengelolaan keuangan desa secara cukup optimal. Sistem tersebut membantu perangkat desa dalam mengelola keuangan desa secara lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi kemanfaatan sistem memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh *Perceived Ease of Use* terhadap pengelolaan Keuangan Desa

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_2) Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti *Perceived Ease of Use* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Luahagundre Maniamolo. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin mudah sistem pengelolaan keuangan desa digunakan, maka pengelolaan keuangan desa akan semakin baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat desa lebih mudah menjalankan tugas pengelolaan keuangan apabila sistem yang digunakan sederhana dan mudah dipahami.

Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kutai Timur

Muhammad Rizal Farsanjani, Yunita Fitria

Sistem yang tidak rumit membantu perangkat desa dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan desa secara lebih tertib dan efisien.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan *Technology Acceptance Model (TAM)* yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan memengaruhi penerimaan dan penggunaan suatu sistem. Dalam pengelolaan keuangan desa, sistem yang mudah dioperasikan mendorong perangkat desa untuk menggunakan sistem secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas keuangan desa. *Perceived Ease of Use* pada desa-desa di Kecamatan Luahagundre Maniamolo diukur melalui kuesioner yang mencerminkan kemudahan perangkat desa dalam memahami alur sistem, menggunakan fitur yang tersedia, serta menyelesaikan pekerjaan pengelolaan keuangan desa. Hasil penilaian responden menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan desa dinilai relatif mudah digunakan.

Pengaruh *Perceived Usefulness* dan *perceived Ease of Use* Secara Simultan terhadap Pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan, dapat disimpulkan bahwa *Perceived Usefulness* dan *Perceived Ease of Use* secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Luahagundre Maniamolo. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa kebermanfaatan sistem dan kemudahan penggunaannya merupakan faktor penting dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan desa akan berjalan lebih optimal apabila sistem yang digunakan tidak hanya memberikan manfaat nyata bagi pekerjaan perangkat desa, tetapi juga mudah dipahami dan dioperasikan.

Perangkat desa cenderung lebih efektif dalam menjalankan tugas pencatatan dan pelaporan keuangan apabila sistem yang digunakan mampu membantu pekerjaan sekaligus tidak menyulitkan dalam penggunaannya. Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan *Technology Acceptance Model (TAM)* yang menyatakan bahwa persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) secara bersama-sama memengaruhi penerimaan dan penggunaan suatu sistem. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, sistem yang bermanfaat dan mudah digunakan akan meningkatkan kinerja perangkat desa dalam mengelola keuangan desa secara tertib, akurat, dan tepat waktu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes dalam perspektif *Technology Acceptance Model (TAM)* pada desa di Kecamatan Luahagundre Maniamolo, dapat disimpulkan bahwa variabel *Perceived Usefulness (PU)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes. Selain itu, variabel *Perceived Ease of Use (PEU)* juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes. Secara simultan, variabel *Perceived Usefulness (PU)* dan *Perceived Ease of Use (PEU)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes. Dengan demikian, semakin tinggi persepsi aparatur desa terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan aplikasi Siskeudes, maka semakin baik pengelolaan keuangan desa yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V., & Damayanti, N. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana. 5(September), 134–143.
- Akhmadi, M. H. (2017). Evaluasi Strategi Dukungan Organisasi Terhadap Implementasi E-Government : Studi Kasus Sistem Aplikasi Keuangan Negara.
- Alfiani, N. (2020). (Penelitian pada Desa di Kabupaten Tegal).
- Anggraeni, R., & Alijoyo, F. A. (2025).
- Ardiansyah, M. D., & Sriyono, S. (2020). Pengaruh Kompetensi, Peran Perangkat Desa Pemahaman Pengelolaan Dana Desa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesian Journal of Innovation*

Studies, 13, 1–12.

- Ariyanto, S., Azwirman, & Sunny, J. F. (2025). Analisis Faktor-Faktor Penerimaan Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes): Pendekatan TAM dan TPB. *Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi*, 1, 125–134.
- Arsyad, A. (2022). Analisis Efektivitas Penggunaan Aplikasi Siskeudes Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 145–156. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xyz123>
- Bawansel, G. I., Walandouw, S. K., & Sardjono, O. Y. M. (2025). Analisis keuangan (Siskeudes) : Studi kasus Desa Komus II Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 3, 570–580. <https://doi.org/10.58784/rapi.405>
- Damayanti, R., Prema, P., Putri, S., Nugrahesthy, A., & Hapsari, S. (2022). Evaluasi Sistem Keuangan Desa Technology Acceptance Model. 14, 71–81.
- Davis, F. D., & Venkatesh. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease Use, User Acceptance Information Technology. 319–340.
- Eddy Roflin, pariyana, & iche andriyan liberty. (2022). Kupas Tuntas Analisis Regresi Tunggal dan Ganda. NEM.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Proqram IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Halawa, M. H., Situngkir, A., & Nofianna, S. A. (2022).
- Indonesia, K. D. N. R. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa. Kemendagri.
- Indonesia, K. K. R. (2023). Data Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Kemenkeu.
- Indriani, N., Hardi, R., & Khaerah, N. (2024). Penggunaan Aplikasi Siskeudes Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Garing Kabupaten Gowa. 3(1), 32–37.